



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL **SEMESTER I TAHUN 2024**



KAPTEN PILAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pangkalan Pengawasan SDKP Tual adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan *Pangkalan Pengawasan SDKP Tual* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pangkalan Pengawasan SDKP Tual. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tual, 11 Juli 2024

Kepala Pangkalan PSDKP Tual



Sigit Bintoro, S.Pi

19721022 199803 1 003



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL**

JL. BUKIT DUMAR NO.1 KOMPLEK PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL
KOTA TUAL 97611 TELEPON (0916) 21696 FAKSIMILE (0916) 21606
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.tual@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan *Pangkalan Pengawasan SDKP Tual* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 30 Juni 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tual, 11 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Pangkalan PSDKP Tual



Sigit Bintoro, S.Pi

19721022 199803 1 004

Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Periode Semester I Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp35,564,941,-. sedangkan Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp96,353,333,- atau mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sesuai kebijakan pada TA.2024 sudah tidak terdapat Penerimaan yang bersumber dari Denda Administratif.

Sementara Belanja Pemerintah Pusat pada Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp13,696,631,691,- atau sudah mencapai 19,38% dari Pagu Anggaran senilai Rp 70,706,563,000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Semester I Tahun Anggaran 2024. Nilai Aset Semester I Tahun Anggaran 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp51,221,385,700,- yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp927,938,482,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp49,892,159,848,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp401,287,370,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1,260,030,081,- dan Rp49,961,355,619,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3,931,037,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp16,737,808,122,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 16,733,877,085,-). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 15,163,904,- dan sebesar (Rp16,718,713,181,-) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp16,718,713,181,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30

Juni 2024 adalah sebesar Rp52,913,337,599,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp 16,718,713,181,-) ditambah dengan koreksi yang menambah ekuitas senilai Rp105,664,451,- dan dikurangi dengan koreksi nilai aset tetap/lainnya non revaluasi senilai Rp0 ditambah dengan koreksi nilai aset tetap non revaluasi senilai Rp0 dikurangi koreksi nilai aset non revaluasi senilai (Rp105,582,101,-) dan sehingga Lain-Lain menjadi Rp82,350 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13,661,066,750,- dan penurunan ekuitas senilai (Rp2,951,981,980,-) sehingga Ekuitas Akhir entitas pada Semester I TA 2024 adalah senilai Rp49,961,355,619,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	35.564.941	0,00	96.353.333
JUMLAH PENDAPATAN		-	35.564.941	0,00	96.353.333
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	11.894.652.000	6.344.712.140	53,3	5.355.942.063
Belanja Barang	B.4	56.621.211.000	6.316.175.551	11,2	17.909.323.824
Belanja Modal	B.5	2.190.700.000	1.035.744.000	47,3	95.036.150
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		70.706.563.000	13.696.631.691	19,37	23.360.302.037

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL NERACA UNTUK SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	300.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	23.193.100	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	16.470.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	(82.350)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	604.745.382	663.464.596
Jumlah Aset Lancar		927.938.482	679.852.246
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	17.914.787.000	17.914.787.000
Peralatan dan Mesin	C.15	79.681.718.476	82.660.082.020
Gedung dan Bangunan	C.16	18.361.988.619	18.361.988.619
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	24.948.642.274	24.948.642.274
Aset Tetap Lainnya	C.18	142.680.000	142.680.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	31.746.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(91.189.402.521)	(91.737.316.093)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.21	-	-
Jumlah Aset Tetap		49.892.159.848	52.290.863.820
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	3.996.661.544	14.300.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(3.595.374.174)	(14.300.000)
Jumlah Aset Lainnya		401.287.370	-
JUMLAH ASET		51.221.385.700	52.970.716.066
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.24	622.892.622	57.378.467
Utang yang belum ditagihkan	C.25	337.137.459	-
Uang Muka dari KPPN	C.25	300.000.000	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.260.030.081	57.378.467
JUMLAH KEWAJIBAN		1.260.030.081	57.378.467
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	49.961.355.619	52.913.337.599
JUMLAH EKUITAS		49.961.355.619	52.913.337.599
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		51.221.385.700	52.970.716.066

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL LAPORAN OPERASIONAL UNTUK SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	3.931.037	55.520.000
JUMLAH PENDAPATAN		3.931.037	55.520.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6.773.738.542	5.689.362.079
Beban Persediaan	D.3	172.360.256	143.174.272
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.338.414.258	15.730.562.829
Beban Pemeliharaan	D.5	1.467.945.457	1.182.956.769
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.846.606.906	1.310.472.678
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3.138.742.703	3.210.063.479
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		16.737.808.122	27.266.592.106
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16.733.877.085)	(27.211.072.106)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		15.163.904	40.833.333
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		15.163.904	40.833.333
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		15.163.904	40.833.333
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(16.718.713.181)	(27.170.238.773)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(16.718.713.181)	(27.170.238.773)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	52.913.337.599	58.059.025.189
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(16.718.713.181)	(27.170.238.773)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	105.664.451	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	105.582.101	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	82.350	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	13.661.066.750	23.263.948.704
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS		(2.951.981.980)	(3.906.290.069)
EKUITAS AKHIR	E.5	49.961.355.619	54.152.735.120

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pangkalan Pengawasan SDKP Tual

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Pangkalan Pengawasan SDKP Tual didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur melalui peraturan Menteri Nomor:PER.04/MEN/2006 tanggal 12 September 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Berdasarkan Persetujuan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara Nomor: B2712/M.PAN/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 di bentuk UPT Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual yang bersifat lebih operasional dan mandiri, hal ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dibebankan pada Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Stasiun Pengawasan SDKP Tual ditingkatkan status kelembagaannya menjadi Pangkalan Pengawasan SDKP Tual setingkat Eselon IIIa yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal PSDKP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Struktur penyusunan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan di dalam Renstra KKP 2020-2024 mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tingkat kementerian/lembaga menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis (*outcome/impact*) beserta indikator kinerjanya yang berpedoman pada RPJMN. Selanjutnya unit Eselon I dengan dijabatani oleh Arah Kebijakan dan Strategi, merumuskan Program, Sasaran Program (*outcome*) beserta indikator kinerjanya dan Kegiatan, Sasaran Kegiatan beserta indikator kinerjanya pada tingkat Eselon II.

Visi KKP 2020-2024 yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2020-2024 tersebut maka dirumuskan Misi KKP 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset

Kelautan dan Perikanan;

- 2) Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- 3) Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 4) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Sebagai penjabaran Visi dan Misi KKP maka dirumuskan beberapa Tujuan KKP 2020-2024 yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis berikut indikator kinerjanya. Pada 5 (lima) tahun ke depan, Ditjen. PSDKP akan berkontribusi pada beberapa Tujuan KKP 2020-2024 berikut ini:

- 1) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui pencapaian Sasaran Strategis Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024. Formula perhitungan IKMKP dibangun oleh 2 aspek utama yaitu: ekonomi dan sosial-kelembagaan. Data tingkat keaktifan atau partisipasi Pokmaswas akan menjadi salah satu variabel pada aspek sosial-kelembagaan.
- 2) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pencapaian beberapa Sasaran Strategis, diantaranya:
 - a. Tata kelola SDKP bertanggung jawab dengan indikator kinerja Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dari 89% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024;
 - b. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif dengan indikator kinerja:
 - I. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54,18% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024; dan
 - II. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, dengan target 93% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- 3) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui pencapaian Sasaran Strategis Tatakelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja berikut ini:
 - a. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 80 pada tahun 2020 menjadi 85 pada tahun 2024 dan
 - b. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP dari 88

pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

Visi Ditjen PSDKP adalah pembangunan kelautan dan perikanan Direktorat Jenderal PSDKP 2020 - 2024 adalah "Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terawasi, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan"

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka ditetapkan misi :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
2. Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
3. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
4. Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
5. Memastikan kemanfaatan SDKP bagi masyarakat Kelautan dan Perikanan.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024 adalah :

1. Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
2. Terlindunginya SDKP dari kegiatan yang ilegal dan merusak
3. Memastikan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang kondusif.

Visi Pangkalan Pengawasan SDKP Tual adalah pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual 2020 - 2024 adalah "Pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terawasi, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan di Lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Tual"

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka ditetapkan misi :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual
2. Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual
3. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual
4. Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual

5. Memastikan kemanfaatan SDKP bagi masyarakat KP di Wilayah Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual tahun 2020 - 2024 adalah :

1. Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual
2. Terlindunginya SDKP dari kegiatan yang illegal dan merusak Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual
3. Memastikan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang kondusif Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.

Wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual meliputi 3 Propinsi (Maluku, Papua dan Papua Barat) dan 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni :

- a. WPP 714, meliputi perairan Laut Banda;
- b. WPP 715, meliputi perairan Laut Seram, Laut Halmahera dan Teluk Bintuni;
- c. WPP 718, meliputi Laut Aru dan Laut Arafuru.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual terdiri dari 2 (dua) unit kapal pengawas perikanan tipe C, 1 (satu) unit *speedboat* Pengawas ukuran 16 m, 1 (satu) unit *speedboat* Pengawas ukuran 6,5 m, 7 (tujuh) unit *speedboat* Pengawas ukuran 12 m yang tersebar di Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Tual, 1 (satu) unit *Rubber Boat*, 1 (satu) unit *Rigid Inflatable Boat*. Dalam hal prasarana (infrastruktur), Pangkalan Pengawasan SDKP Tual memiliki 1 (satu) kantor pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang merupakan Gedung utama, 3 (tiga) unit kantor Satuan Pengawasan (non Eselon) dan 3 (tiga) unit kantor Wilayah Kerja (non Eselon). Pangkalan Pengawasan SDKP Tual juga memiliki dermaga kapal pengawas perikanan, Gudang barang bukti, serta mini laboratorium. Kemudian prasarana yang sangat diandalkan dalam melakukan pemantauan kapal-kapal ikan adalah *Regional Monitoring Center* (RMC). Pengoperasian RMC mengintegrasikan data dari *Vessel Monitoring System* (VMS), RadarSat, dan *Automatic Identification System* (AIS) sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal operasi pencegahan (*intercept*) oleh armada kapal pengawas.



Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual didukung oleh 138 (seratus empat puluh dua) orang sumber daya manusia dari tingkat pejabat eselon III sampai dengan pelaksana/staf .

Rincian jumlah pegawai negeri sipil pada Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Sebanyak 91 orang yang terdiri dari Golongan II sebanyak 22 Orang dan Golongan III sebanyak 67 Orang dan Golongan IV sebanyak 2 Orang. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai di alokasikan untuk 91 orang pusat dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) 47 orang.

Rincian Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	PNS PUSAT	PNS DAERAH	Pegawai Kontrak
1	Pangkalan PSDKP Tual	31		23
2	WILKER PSDKP Dobo	2		3
3	WILKER PSDKP Warabal	0		2
4	SATWAS Maluku Tenggara Barat	3		2
5	SATWAS Merauke	9		3
6	WILKER Wanam	0		0
7	SATWAS Sorong	7		4
8	WILKER Raja Ampat	2		2
9	SATWAS Mimika	4		3
10	SATWAS Kaimana	2		3
11	WILKER Fakfak	2		1
12	WILKER Wimro	0		1
13	KP. Hiu 14	10		0
14	KP. Hiu Macan 006	14		0
15	KP. ORCA 03	1		0
16	Tugas Belajar	4		0

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.82/MEN/KU.611/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2018 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

EKSISTING	
<i>Kuasa Pengguna Anggaran</i>	<i>Sigit Bintoro, S.Pi</i>
	19721022 199803 1 004

Kerangka pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang kaitannya dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan Pengawasan SDKP Tual bersumber dari dana APBN yang direncanakan dengan mempertimbangkan luasan wilayah kerja dan beban kerja pengawasan SDKP yang ada dilapangan dan mengaju pada program kerja yang mendukung visi dan misi Kementerian/Lembaga. Rincian kerangka pendanaan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual terdiri dari:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemantauan dan Operasi Armada	Rp 33.130.185.000
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 235.400.000
3	Pengawasan Pengelolaan Sumber daya Kelautan	Rp 753.564.000
4	Pengawasan Pengelolaan Sumber daya Perikanan	Rp 740.000.000
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	Rp 19.530.730.000
Total Anggaran		Rp 54.389.879.000

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Tual. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

**Basis
Akuntansi**

A.3. Basis Akuntansi

Pangkalan Pengawasan SDKP Tual menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Dasar
Pengukuran**

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Kebijakan
Akuntansi**

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pangkalan Pengawasan SDKP Tual. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara First In First Out (FIFO) di Periode 31 Desember Tahun 2023 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal

22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - ✓ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - ✓ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - ✓ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan

berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset

Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- ✚ Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- ✚ Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- ✚ Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitsebbesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pangkalan Pengawasan SDKP Tual telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi DIPA selama Semester I TA.2024 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali. Rincian revisi terdiri dari:

Revisi DIPA ke-	Tanggal Revisi DIPA	Pertimbangan Revisi DIPA
Revisi ke - 1	25 Januari 2024	Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, Ditjen PSDKP mendapatkan blokir AA sebesar Rp83.004.572.000,- yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni (RM) Berkaitan dengan hal tersebut PSDKP Tual mendapatkan Blokir AA sebesar Rp. 949.524.000 dan Buka Blokir Perangkat Pengolah Data sebesar Rp. 150.000.000
Revisi ke - 2	28 Februari 2024	Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024
Revisi ke - 3	22 April 2024	Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024

Revisi DIPA ke-	Tanggal Revisi DIPA	Pertimbangan Revisi DIPA
Revisi ke - 4	1 Mei 2024	Buka anggaran yang diblokir sebesar total Rp. 82.250.000 yang di revisi ke anggaran Listrik Darat yang disebabkan karena adanya peningkatan biaya Listrik Darat dikarenakan potensi pada Tahun 2024 banyak Kapal Pengawas Perikanan yang melakukan Pengawasan di Zona 3 (WPP 718) sehingga harus bersandar di Dermaga Pangkalan PSDKP Tual dan Pengurangan Volume Output Dikarenakan terjadi kesalahan pada sistem SAKTI pada saat penginputan sehingga mengakibatkan Volume Output pada 2355.CAN (Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan 2355.EBB (Layanan Sarana dan Prasarana Internal) terinput otomatis mengikuti Volume Output TA.2023 dimana yang seharusnya 2355.CAN hanya 6 Unit menjadi 12 Unit dan 2355.EBB yang seharusnya 5 Unit menjadi 6 Unit.
Revisi ke - 5	6 Juni 2024	Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024

- **Revisi DIPA ke 01** hanya Revisi Blokir AA sebesar Rp. 949.524.000 dan Buka Blokir Perangkat Pengolah Data sebesar Rp. 150.000.000
- **Revisi DIPA ke 02** hanya Revisi Halaman III DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024.
- **Revisi DIPA ke 03** hanya Revisi Halaman III DIPA yang meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024.
- **Revisi DIPA ke 04** hanya Buka anggaran yang diblokir sebesar total Rp. 82.250.000 yang di revisi ke anggaran Listrik Darat oleh

karena adanya peningkatan biaya Listrik Darat dikarenakan potensi pada Tahun 2024 banyak Kapal Pengawas Perikanan yang melakukan Pengawasan di Zona 3 (WPP 718) dan bersandar di Dermaga Pangkalan PSDKP Tual dan Pengurangan Volume Output Dikarenakan terjadi kesalahan pada sistem SAKTI pada saat penginputan sehingga mengakibatkan Volume Output pada 2355.CAN (Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan 2355.EBB (Layanan Sarana dan Prasarana Internal) terinput otomatis mengikuti Volume Output TA.2023 dimana yang seharusnya 2355.CAN hanya 6 Unit menjadi 12 Unit dan 2355. EBB yang seharusnya 5 Unit menjadi 6 Unit.

- **Revisi DIPA ke 05** hanya Revisi Halaman III DIPA yang meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024.

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Rp35,564,941,-

Realisasi Pendapatan untuk periode Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp148.856.018,- atau mencapai 398,44 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp37.360.000. Pendapatan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Tual terdiri dari Penerimaan Negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:

- ✚ Lelang dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang meliputi fasilitas perkantoran sesuai Risalah Lelang nomor 75/80/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebesar **Rp15,163.904,-** dengan nomor NTB: 000000254955 dan nomor NTPN: 1C49C1JNFLRCN67T tanggal 7 Juni 2023.
- ✚ Denda Keterlambatan sebesar **Rp3,931,037,-** atas Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebanyak 3 (tiga) unit Laptop Travelmate sesuai nilai kontrak yaitu Rp42,400,000,-
- ✚ Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa Pengembalian Tunjangan kepada pegawai tugas belajar yaitu sebesar **Rp16,470,000,-** atas jenis pelanggaran membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan dengan nomor NTB: 922539670568, nomor NTPN: CF36661QUR0QLB53 dan tanggal bayar 3 Oktober 2023;

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		15.163.904	
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		3.931.037	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		16.470.000	
Jumlah		35.564.941	

Realisasi

Belanja

Negara

Rp13.696.631.691,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Pangkalan Pengawasan SDKP Tual pada Semester I TA 2024 adalah sebesar 13.696.631.691 atau 19,37% dari anggaran belanja sebesar Rp70.706.563.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	11.894.652.000	6.344.712.140	53,34
Belanja Barang	56.621.211.000	6.316.175.551	11,16
Belanja Modal	2.190.700.000	1.035.744.000	47,28
Belanja Bantuan Sosial			-
Total Belanja Kotor	70.706.563.000	13.696.631.691	19,37
Pengembalian			-
Jumlah	70.706.563.000	13.696.631.691	19,37

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar (41,37%). Hal ini disebabkan karena pada realisasi belanja barang TA 2024 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar Rp6.316.175.551,- bila dibandingkan dengan realisasi belanja barang TA 2023 yaitu sebesar Rp17,909,323,824,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6.344.712.140	5.355.942.063	18,46
Belanja Barang	6.316.175.551	17.909.323.824	(64,73)
Belanja Modal	1.035.744.000	95.036.150	989,84
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	13.696.631.691	23.360.302.037	(41,37)

Hasil Capaian Output Realisasi Belanja akan dijelaskan melalui Tabel pada Lampiran di Laporan ini.

B.3 Belanja Pegawai

Belanja

Pegawai

Rp6.344.712.140,-

Realisasi Belanja Pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Semester I TA 2024 dan TA 2023 adalah masing - masing sebesar **Rp6.344.712.140,-** dan **Rp5.355.942.063,-**. Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2024 mengalami kenaikan sebesar **18,46%** bila dibandingkan dengan Semester I TA 2023. Hal ini di sebabkan karena adanya penambahan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 7 Pegawai. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS (PPNPN). Realisasi belanja Pegawai Pangkalan PSDKP Tual adalah sebanyak 88 pegawai yang terdiri dari Golongan II sebanyak 21 Orang dan Golongan III sebanyak 65 Orang dan Golongan IV sebanyak 2 Orang. Rincian anggaran dan realisasi belanja Pegawai Semester I TA 2024 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.194.062.648	2.995.949.963	6,61
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	290.301.042	-	100,00
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus	2.860.348.450	2.359.992.100	21,20
Jumlah Belanja Kotor	6.344.712.140	5.355.942.063	18,46
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	6.344.712.140	5.355.942.063	18,46

B.4 Belanja Barang

Belanja

Barang

Rp6.316.175.551,-

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.316.175.551,- dan Rp17.909.323.824,-. Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2024 mengalami penurunan signifikan yaitu sebesar **(64,73%)** dari Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2023. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan pagu anggaran untuk hari operasi kapal Pengawas dan hanya sebagian kecil yang dikenakan *Automatic Adjustment* (AA) dalam pengelolaan pagu belanja barang TA.2023 bila dibandingkan dengan TA.2024.

Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.173.120.722	1.383.919.279	(15,23)
Belanja Barang Non Operasional	1.355.295.467	13.551.121.217	(90,00)
Belanja Barang Persediaan	192.532.506	161.187.286	19,45
Belanja Jasa	660.508.818	552.820.368	19,48
Belanja Pemeliharaan	1.195.590.852	1.113.098.545	7,41
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.739.127.186	1.147.177.129	51,60
Jumlah Belanja Kotor	6.316.175.551	17.909.323.824	(64,73)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	6.316.175.551	17.909.323.824	(64,73)

- Belanja Barang Operasional pada Pangkalan Pengawasan SDKP Tual antara lain seperti belanja keperluan perkantoran, penambah daya tahan tubuh, pengiriman surat dinas ke kantor pusat, honor operasional Satker dan belanja barang operasional lainnya.
- Belanja barang Non Operasional antara lain seperti Belanja Bahan untuk Uang Makan Awak Kapal Pengawas, konsumsi kegiatan seperti kegiatan penyidikan, Uang Makan ABK, Uang Jaga Barang Bukti, Biaya Perpanjangan STNK dan Honor output kegiatan. Dimana penetapan harga dan besaran nilai rupiah pada RAK-KL Pangkalan Pengawasan SDKP Tual belum memiliki dasar hukum pembayaran berupa SBML dari Kementerian Keuangan tetapi masih menggunakan penetapan harga sendiri.
- Belanja Barang Persediaan pada Pangkalan Pengawasan SDKP Tual antara lain seperti Belanja Persediaan Bahan Bakar, Air Bersih, pelumas dan obat-obatan untuk Kapal Pengawas, *Speedboat*, *Rigit Inflatable Boat* dan *Rubber Boat*, Persediaan Alat Tulis Kantor, *Computer Supply*, dan penjilidan, pengadaan SLO, Keperluan kantor seperti Alat Rumah Tangga, Air Minum, Alat Kebersihan dan belanja barang persediaan lainnya.
- Belanja jasa pada Pangkalan Pengawasan SDKP Tual antara lain seperti Belanja Langganan Listrik, Telepon dan Air, Belanja Sewa, Honor Narasumber kegiatan, Ongkos angkut BBM Kapal Pengawas dan Belanja Jasa Lainnya.
- Belanja pemeliharaan pada Pangkalan Pengawasan SDKP Tual meliputi : Pemerlihaaran Peralatan dan Mesin, contohnya *Docking* Kapal Pengawas, Perbaikan Darurat dan Rutin Kapal Pengawas, Perbaikan Rutin *Speedboat*, *Rigit Inflatable Boat* dan *Rubber Boat*, Pemeliharaan Komputer, Laptop, AC, Genset, Kendaraan Dinas, Inventaris Kantor dan lain-lain; dan pemeliharaan gedung dan bangunan.
- Belanja perjalanan dinas dalam negeri pada Pangkalan Pengawasan SDKP Tual meliputi : Perjalanan Dinas dalam rangka Penyidikan

Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan, Transpor lokal untuk kegiatan pengawasan Sumber daya kelautan (SDK) dan Sumber daya perikanan (SDP) diantaranya pengawasan Destuctive Fishing, Pengawasan Ekspor Impor dan pengawasan SDP dan SDK lainnya, Transport lokal dan perjalanan dinas yang terkait dengan administrasi dan keuangan dan belanja perjalanan dinas dalam negeri lainnya.

B.5 Belanja Modal

**Belanja
Modal**
Rp1.035.744.000,-

Realisasi Belanja Modal Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Semester I TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.035.744.000,- dan Rp95.036.150,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Semester I TA 2024 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 989,84 persen bila dibandingkan Semester I TA 2023 dikarenakan terdapat pembelian peralatan dan mesin dalam jumlah yang besar.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.003.998.000	95.036.150	956,44
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.746.000		0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			0,00
Belanja Modal BLU			0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.035.744.000	95.036.150	989,84
Pengembalian			0,00
Jumlah Belanja	1.035.744.000	95.036.150	989,84

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester I TA.2024 dan TA.2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2020	REALISASI TA. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Semester I TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp1.003.998.000,- dan Rp95.036.150,-. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2024 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 956,44% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023, hal ini

disebabkan karena pada TA 2024 terdapat pekerjaan *Top Overhaul* KP Hiu Macan 06.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	1.003.998.000	95.036.150	956,44
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.003.998.000	95.036.150	956,44
Jumlah Belanja	1.003.998.000	95.036.150	956,44

- Berikut rincian transaksi pembelian peralatan dan mesin senilai Rp1.003.998.000,- adalah sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Nilai (Rp)	Ket
1	3.02.01.02.003	Mitsubshi New Pajero Sport/2,5L Exceed-L(4x2)5MT	1	580.500.000	
2	3.02.01.02.003	Toyota Avanza/1.5 G.M/T	1	304.000.000	
3	3.02.01.04.001	Yamaha/New Mio M3 CW	1	21.750.000	
4	3.03.03.01.072	Garmin GPSMAP 79S	1	7.750.000	
5	3.05.02.06.002	Polytron LED	1	5.750.000	
6	3.06.01.02.128	Sony Body Only Kamera Mirrorless Sony Alph A6400	1	15.750.000	
7	3.06.01.05.047	DJI Drone Mavic 3 PRO	1	42.750.000	
8	3.08.01.46.002	AZ.Instrument AZ-86031 Water Quality Meter	1	8.250.000	
9	3.10.01.02.009	Samsung Galaxy Tab/S9FE	1	8.749.000	
10	3.10.01.02.009	Samsung Galaxy Tab/S9FE	1	8.749.000	
JUMLAH				1.003.998.000	

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Semester I TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp31,746,000,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar (100) persen dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan karena terdapatnya pekerjaan pembangunan fisik selama tahun 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Semester I TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA.2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.746.000	0	100,00
Jumlah Belanja Kotor	31.746.000	0	100,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	-
Jumlah Belanja	31.746.000	0	100,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Semester I TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 tidak mengalami penurunan sebesar 100 persen jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan karena tidak terdapatnya pekerjaan pembangunan fisik selama tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	-
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	-
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan	0	0	-
Belanja Modal Jaringan	0	0	-
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Modal	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Semester I TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0,-*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Semester I TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp300.000.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp300.000.000 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran terdiri dari UP sebesar Rp300.000.000 dan TUP sebesar Rp0. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023

Keterangan	TA.2024	TA. 2023
Saldo UP	300.000.000	-
Kwitansi UP belum di SPJ-kan	-	-
Selisih pembukuan UP	-	-
Jumlah	300.000.000	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas
Rp23.193.100,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 30 Juni Tahun 2024 dan per tanggal 30 Juni Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp23.193.100,- dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang
Bukan Pajak
Rp0,-*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak Pangkalan PSDKP Tual per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp16.470.000. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Berikut

Perbandingannya:

Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak Semester I 2024 dan 2023

Uraian	TH 2024	TH 2023
Piutang Bukan Pajak	-	16.470.000
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	16.470.000

*Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian
Lancar TPA
Rp0,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Bukan Pajak
Rp0,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0 dan (Rp82.350,-). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0,-*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp0*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.10 Persediaan

*Persediaan
Rp604.745.382,-*

Nilai Persediaan UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 604.745.382 dan Rp 550.030.826. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Mutasi Persediaan per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Persediaan per 1 Januari 2024		347.622.190
Mutasi Tambah		
Jumlah Pembelian	1.061.187.109	
Transfer Masuk Persediaan	-	
Jumlah Mutasi Tambah		1.061.187.109
Mutasi Kurang		
Beban Persediaan Konsumsi	380.275.925	
Beban Persediaan Suku Cadang	365.068.778	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	
Jumlah Mutasi Kurang		(745.344.703)
Saldo per 30 Juni 2024		663.464.596

Rincian Mutasi Persediaan barang konsumsi per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Persediaan per 1 Januari 2024		38.264.937
Mutasi Tambah		
Jumlah Pembelian	393.353.648	
Transfer Masuk Persediaan		
Jumlah Mutasi Tambah		393.353.648
Mutasi Kurang		
Beban Persediaan Konsumsi	380.275.925	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	
Jumlah Mutasi Kurang		(380.275.925)
Saldo per 30 Juni 2024		51.342.660

Rincian Mutasi Persediaan suku cadang per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Persediaan per 1 Januari 2024		309.357.253
Mutasi Tambah		
Jumlah Pembelian	667.833.461	
Transfer Masuk Persediaan	-	
Jumlah Mutasi Tambah		667.833.461
Mutasi Kurang		
Beban Persediaan Suku Cadang	365.068.778	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		
Jumlah Mutasi Kurang		(365.068.778)
Saldo per 30 Juni 2024		612.121.936

Rincian Persediaan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester I TA. 2024 dan TA. 2023

Jenis	TA. 2024	TA. 2023
Barang Konsumsi	76.279.910	79.673.051
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	528.465.472	470.357.775
Barang Persediaan Bahan Baku	-	-
Jumlah	604.745.382	550.030.826

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian persediaan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Berupa :

- Barang Konsumsi (kode 117111) senilai Rp76.279.910- yang terdiri dari:

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	NILAI
	117111	BARANG KONSUMSI	
1	1010301001	Alat Tulis	1.926.485
2	1010301003	Penjepit Kertas	478.260
3	1010301004	Penghapus/Korektor	95.672
4	1010301005	Buku Tulis	56.332
5	1010301006	Ordner Dan Map	26.141.384
6	1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	775.350
7	1010301010	Alat Perekat	2.145.314
8	1010301012	Staples	428.125
9	1010301013	Isi Staples	88.230
10	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	299.216
11	1010302001	Kertas HVS	8.391.670
12	1010302002	Berbagai Kertas	281.745
13	1010302004	Amplop	176.654
14	1010303999	Bahan Cetak Lainnya	80.000
15	1010304004	Tinta/Toner Printer	15.774.005
16	1010304006	USB/Flash Disk	250.000
17	1010304007	kartu Memori	450.000
18	1010304010	Mouse	1.939.960
19	1010304999	Bahan Komputer Lainnya	1.875.000
20	1010306010	Batu Baterai	100.008
21	1010307999	Perlengkapan Dinas Lainnya	14.526.500
Jumlah Barang Konsumsi			76.279.910

Sedangkan Suku Cadang (kode 117114) senilai Rp 528.465.472,- terdiri dari:

NO	KODE BARANG	URAIAN KODE BARANG	NILAI
	117114	SUKU CADANG	
1	1010201003	Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor	528.465.472
Jumlah Suku Cadang			528.465.472

- Nilai Persediaan yang tercantum dalam laporan Neraca persediaan adalah nilai persediaan yang terletak di Pangkalan PSDKP Tual dan termasuk dengan nilai persediaan pada Kapal Pengawas, Satwas dan Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Tual TA. 2024.

Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0,-*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak
Rp0,-*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak UPT Pangkalan PSDKP Tual 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan (Rp82.350). Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah
Rp17,914,787,
000,-*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki UPT Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual 30 Juni TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 17.914.787.000,- dan Rp 17.914.787.000. Tidak Ada Perubahan nilai mutasi aset tetap Tanah sampai pada tanggal pelaporan.

Rincian mutasi nilai asset tanah di jelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	17.914.787.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2024	17.914.787.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	17.914.787.000

*Peralatan dan
Mesin
Rp79.681.718.476,-*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin UPT Pangkalan PSDKP Tual Semester I TA. 2024 dan TA. 2023 masing - masing adalah Rp79.681.718.476,- dan Rp82.660.082.020. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	82.660.082.020
Mutasi tambah:	
Pembelian / Peralatan Mesin	1.730.068.046
Transfer Masuk	
Transaksi Reklas Masuk	
Mutasi kurang:	
Penghentian Penggunaan	4.708.431.590
Transaksi Reklas Keluar	
Transaksi Reklas Aset Tetap ke Aset lainnya	
Saldo per 30 Juni 2024	79.681.718.476
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	(68.078.932.312)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	11.602.786.164

➤ **132111 (Peralatan dan Mesin)**

No	Jenis	Nilai
101	Pembelian	1.003.998.000
401	Penghentian Aset dari Penggunaan	(3.982.361.544)
304	Reklasifikasi Keluar	(726.070.046)
107	Reklasifikasi Masuk	726.070.046
999	Saldo Awal	82.660.082.020
Total		79.681.718.476

- Mutasi transaksi Penambahan peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	30103	ALAT BANTU	2	3.900.000
2	30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMO	55	4.916.875.336
3	30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BEP	4	16.600.000
4	30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMO	13	68.316.150.690
5	30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	2	7.284.611
6	30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	24	23.020.585
7	30303	ALAT UKUR	47	269.717.579
8	30501	ALAT KANTOR	86	615.529.682
9	30502	ALAT RUMAH TANGGA	318	1.343.400.737
10	30601	ALAT STUDIO	109	859.047.693
11	30602	ALAT KOMUNIKASI	19	119.082.257
12	30603	PERALATAN PEMANCAR	1	237.460.000
13	30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIG	1	371.250.000
14	30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	8.250.000
15	31001	KOMPUTER UNIT	114	1.141.725.855
16	31002	PERALATAN KOMPUTER	120	469.824.418
17	31503	ALAT SAR	95	953.050.033
18	31901	PERALATAN OLAH RAGA	2	9.549.000
Jumlah				79.681.718.476

Terdapat Reklasifikasi Barang Keluar yaitu untuk mengubah kodefikasi barang sesuai dengan surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap nomor: B.2020/PSDKPLan.6/PL.710/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023. Berikut rincian Daftar Barang Reklas Keluar dan Reklas masuk Peralatan dan Mesin:

Daftar Barang Reklas Keluar dan Masuk TA 2023

- Mutasi transaksi Pengurangan peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Barang	Nama Barang	Nilai (Rp)	Ket
1				
TOTAL MUTASI KELUAR			0	

- Penghentian Penggunaan

No	Kode Barang	Nama Barang	Nilai (Rp)
1			
TOTAL MUTASI PENGHENTIAN PENGGUNAAN			0

C.16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan*

*Rp18,361,988,619,-
,-*

Nilai Gedung dan Bangunan UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing -masing adalah Rp18,361,988,619 dan Rp18,361,988,619. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	18.361.988.619
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Kesalahan Input IP	-
Saldo per 30 Juni 2024	18.361.988.619
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	(2.537.344.945)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	15.824.643.674

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Tabel dibawah ini:

No	Kode Barang	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	40101	Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.084.412.619
2	40102	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.576.556.000
3	40401	Tugu/Tanda Batas	3.701.020.000
JUMLAH			18.361.988.619

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp24,948,642,274,
-*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp24,948,642,274,- dan Rp24,948,642,274. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024 **24.948.642.274**

Mutasi tambah:

Pengembangan Nilai Aset (Langsung) -

Pengembangan Melalui KDP -

Mutasi kurang:

Transfer Keluar

Koreksi Kesalahan Input IP Irigasi -

Saldo per 30 Juni 2024 **24.948.642.274**

Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024 (19.423.586.716)

Nilai Buku per 30 Juni 2024 **5.525.055.558**

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Tabel dibawah ini.

➤ Jalan dan Jembatan

No	Kode Barang	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	50101	Jalan	91.354.000
2	50102	Jembatan	239.166.000
JUMLAH			330.520.000

➤ Irigasi

No	Kode Barang	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	50201	Bangunan Air Irigasi	953.048.000
2	50204	Bangunan Pengaman Pantai	22.269.470.634
3	50206	Bangunan Air Bersih	425.221.672
JUMLAH			23.647.740.306

➤ Jaringan

No	Kode Barang	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	50301	Instalasi Air Bersih	10.000.000
2	50310	Instalasi Lain	12.000.000
3	50402	Jaringan Listrik	838.602.968
4	50403	Jaringan Telepon	109.779.000
JUMLAH			970.381.968

**Aset Tetap
Lainnya
Rp401.287.370,-**

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya UPT Pangkalan PSDKP Tual per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah Rp401.287.370 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	3.996.661.544
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2024	3.996.661.544
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	(3.595.374.174)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	401.287.370

Rincian Aset tetap lainnya Semester I TA 2024 dan TA 2023 senilai Rp401.287.370 dan Rp0 yang merupakan Aset Tetap Dalam Renovasi. Aset tetap Dalam Renovasi merupakan Pengurukan Lahan

kantor dan Mess Wilker Raja Ampat yang hak kepemilikan Tanahnya masih di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp31.746.000*

Saldo konstruksi dalam pengerjaan UPT Pangkalan PSDKP Tual Semester I TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah masing-masing sebesar Rp31.746.000 dan Rp 0.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	31.746.000

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp91.189.402.521,
-)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap UPT Pangkalan PSDKP Tual per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing - masing adalah (Rp87.730.604.789,-) dan (Rp91.737.316.093,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I TA 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	79.681.718.476	68.078.932.312	11.602.786.164
2	Gedung dan Bangunan	18.361.988.619	2.537.344.945	15.824.643.674
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.948.642.274	20.573.125.264	4.375.517.010
4	Aset Tetap Renovasi	142.680.000	0	142.680.000
Akumulasi Penyusutan		123.135.029.369	91.189.402.521	31.945.626.848

**Aset Tak
Berwujud Rp0**

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

**Aset Lain-Lain
Rp3,996,661,544,-**

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain UPT Pangkalan PSDKP Tual per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah Rp.3.996.661.544,- dan Rp14,300,000,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	14.300.000
Mutasi tambah:	
Aset Tetap yg tdk digunakan dlm operasi pemerintahan	3.982.361.544
Mutasi kurang:	
Penghapusan	
Saldo per 30 Juni 2024	3.996.661.544

- Mutasi transaksi Penambahan aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	Nilai (Rp)	Ket
TOTAL MUTASI MASUK			0	

**Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp3.595.374.174)**

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya UPT Pangkalan PSDKP Tual per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah (Rp3.595.374.174) & (Rp14,300,000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

**Hibah Yang
Belum**

C.24 Hibah Yang Belum Disahkan

Hibah yang belum disahkan UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah

Disahkan Rp0 sebesar Rp0 dan Rp0.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp300.000.000*

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp300.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. merupakan kewajiban kepada pihak Ketiga, baik pihak pegawai maupun pihak penyedia jasa yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp622,892,622*

C.28 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp622,892,622,- dan Rp57,378,467,-. merupakan kewajiban kepada pihak Ketiga, baik pihak pegawai maupun pihak penyedia jasa yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Semester I TA 2024 adalah sebagai Berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Beban pegawai yang masih harus dibayar	444.446.402
2	Beban barang yang masih harus dibayar	155.253.120
3	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	23.193.100
	Total Beban yang Masih Harus Dibayar	622.892.622

C.29 Ekuitas

Ekuitas

Rp49.961.355.619

Ekuitas UPT Pangkalan PSDKP Tual per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp49.961.355.619 dan Rp52.913.337.599. Ekuitas pada Semester I TA 2024 mengalami Penurunan sebesar (5,58%) bila dibandingkan dengan Ekuitas pada Semester I TA 2023 hal ini dikarenakan masih terdapat Aset yang dihentikan dan masih dalam proses penghapusan melalui hasil Lelang. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

**Pendapatan
PNBP Rp
3,931,037,-**

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah PNBP Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 3,931,037,- dan Rp 55,520,000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2024

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	3.931.037	55.520.000	(92,92)
Jumlah	3.931.037	55.520.000	(92,92)

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Operasional TA 2024 dengan TA 2024 mengalami penurunan Signifikan. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut terdiri dari:

- ✚ Denda Keterlambatan sebesar Rp 1.608.750,- atas Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa Perencanaan teknis pembangunan Pos Pengawasan Satwas SDKP Sorong sesuai nilai kontrak yaitu Rp 39,682,500,-
- ✚ Denda Keterlambatan sebesar Rp 1.516.882,- atas Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa Pembuatan Repairlist Docking Kapal Pengawas sesuai nilai kontrak yaitu Rp 94,805,100,-
- ✚ Denda Keterlambatan sebesar Rp 805.405,- atas Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berupa Pengadaan Drone, GPS, Kamera dan Water Quality Meter sesuai nilai kontrak yaitu Rp 17,498,000,-

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak disajikan pada Tabel di bawah ini:

No	Kode Akun	Uraian Akun	Nilai (Rp)	Ket
3	425811	Denda Keterlambatan Pekerjaan	1.608.750	Perencanaan Pembangunan Pos Satwas SDKP Sorong
5	425811	Denda Keterlambatan Pekerjaan	1.516.882	Repairlist Docking Kapal Pengawas
5	425811	Denda Keterlambatan Pekerjaan	805.405	Pengadaan Drone, GPS, dll
JUMLAH			3.931.037	

**Beban
Pegawai
Rp6,773,738,
542,-**

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 6,773,738,542 dan Rp 5,689,362,079. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan.

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2024

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	3.407.938.099	3.329.369.979	2,36
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	2.967.199.193	-	100,00
Beban Lembur			0,00
Beban Tunjangan Khusus PNS	176.365.000	2.359.992.100	-92,53
Beban Tunjangan Khusus PPPK	222.236.250		100,00
Sub Total	6.773.738.542	5.689.362.079	110
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	6.773.738.542	5.689.362.079	19,06

Realisasi belanja Pegawai Pangkalan PSDKP Tual yang terdiri dari PNS dan PPPK yaitu sebanyak 88 pegawai yang terdiri dari Golongan II sebanyak 21 Orang, Golongan III sebanyak 65 Orang dan Golongan IV sebanyak 2 Orang.

Terdapat selisih sebesar Rp6,399,000,- utang pihak ke-3 Beban Pegawai TA 2024 senilai Rp15,420,000,- dan Beban Pegawai TA 2023 senilai Rp21,819,000,-. Hal ini akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Rincian Selisih Beban Pegawai Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2023	TH 2022	SELISIH
Uang Makan PNS Desember	14.532.000	21.819.000	7.287.000,00
Uang makan PPPK Desember	888.000	-	-888.000,00
Jumlah	15.420.000	21.819.000	6.399.000

**Beban
Persediaan
Rp
172,360,256**

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 203 masing-masing adalah sebesar Rp 172,360,256,- dan Rp 143,174,272,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2024

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	172.360.256	143.174.272	20,38
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	172.360.256	143.174.272	20,38

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban
Barang dan
Jasa
Rp3,338,41
4,258*

Jumlah Beban Barang dan Jasa Pangkalan PSDKP Tual Semester I TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 3,338,414,258,- dan Rp. 15,730,562,829,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.006.857.565	1.290.977.503	(22,01)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	124.160.587	138.734.675	(10,51)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	52.587.320	21.412.409	145,59
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	41.664.000	83.645.000	(50,19)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		9.408.692	(100,00)
Beban Bahan	966.746.678	13.035.032.765	(92,58)
Belanja Honor Output Kegiatan	25.632.000	3.400.000	653,88
Beban Barang Non Operasional Lainnya	466.432.353	635.786.132	(26,64)
Beban Langganan Listrik	236.619.175	296.687.855	(20,25)
Beban Langganan Telpon	28.943.378	33.390.798	(13,32)
Beban Langganan Air	57.627.707	51.781.200	11,29
Beban Sewa	58.898.000	57.200.000	2,97
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	18.327.593	0	100,00
Beban Jasa Profesi	6.000.000	0	100,00
Beban Jasa Lainnya	247.917.902	73.105.800	239,12
Jumlah	3.338.414.258	15.730.562.829	(78,78)

Terdapat selisih sebesar Rp17,698,422,- utang pihak ke-3 Beban Barang dan Jasa TA 2024 senilai Rp41,958,467,- dan Beban Barang dan Jasa TA 2023 senilai Rp59,656,889,-. Hal ini akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Rincian Selisih Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2023	TH 2022	SELISIH
Langganan Internet	7.138.567	5.009.000	-2.129.567,00
Langganan Listrik	34.139.615	54.590.889	20.451.274,00
Langganan Air	680.285	57.000	-623.285,00
Jumlah	41.958.467	59.656.889	17.698.422

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
an Rp
1,467,945,4
57*

Beban Pemeliharaan Pangkalan PSDKP Tual Semester I TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1,467,945,457 ,- dan Rp 1,182,956,769,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada beban persediaan bahan Untuk pemeliharaan dan pada beban pemeliharaan gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan TA 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	420.529.059	185.613.220	126,56
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	732.636.701	781.630.680	(6,27)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.730.000	74.647.855	(93,66)
Beban Pemeliharaan Suku Cadang	310.049.697	141.065.014	119,79
Jumlah	1.467.945.457	1.182.956.769	24,09

D.6 Beban Perjalanan Dinas

**Beban
Perjalanan
Dinas Rp
1,846,606,9
06**

Beban Perjalanan Dinas Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar 1,846,606,906 dan Rp 1,310,472,678. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh bertambahnya anggaran perjalanan dinas jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.527.535.886	1.029.869.678	48,3
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.800.000	9.525.000	317,8
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	279.271.020	271.078.000	3,0
Jumlah	1.846.606.906	1.310.472.678	40,91

**Beban
Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,-**

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Tual per 30 Juni Tahun 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2018.

**Beban
Bantuan
Sosial Rp0,-**

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial UPT Pangkalan Pengawasan SDKP per 30 Juni Tahun 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

**Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp
3,138,742,7
03**

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 3,138,742,703,- dan Rp 3,210,063,479,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.588.951.866	2.296.529.630	(30,81)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	199.608.605	197.342.840	1,15
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.391.660	10.696.569	(77,64)
Beban Penyusutan Irigasi	1.133.511.489	1.156.698.489	(2,00)
Beban Penyusutan Jaringan	13.635.399	11.984.497	13,78
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	200.643.684		100,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.138.742.703	3.673.252.025	-14,55

**Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp
0,-**

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

**Surplus/
Defisit dari
Kegiatan
Non Operasi
onal Rp
(15,163,904)**

D.11 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing Rp (15,163,904) dan (Rp 40,833,333). Rincian Kegiatan Non Operasional Semester I TA.2024 dan TA.2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Semester I TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Rp 15.163.904	Rp 40.833.333	-63
Beban Kerugian Pelepasan Aset	Rp -	Rp -	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	15.163.904	40.833.333	(62,86)

*Pos Luar
Biasa Rp0,-*

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa Pangkalan PSDKP Tual TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah Sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp58.059.025.189,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas Pangkalan PSDKP Tual per 1 januari tahun 2024 dan 1 januari tahun 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 52,913,337,599,- dan Rp 58,059,025,189.

Defisit LO
(Rp59.284.442.076,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO Pangkalan PSDKP Tual untuk periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp16,718,713,181) dan (Rp27,170,238,773). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk periode 30 Juni Tahun 2024 dan 30 Juni tahun 2023 masing - masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk periode 31 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Koreksi Atas Reklasifikasi Aset Tetap
Rp0,-

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk periode periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0.

**Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0**

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penurunan selisih revaluasi aset tetap disebabkan oleh belum dilakukannya penilaian kembali terhadap aset tetap oleh KPKNL.

**Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
(Rp 105,582,101)**

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk periode yang berakhir di 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp 105,582,101) dan Rp 0,. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

**Koreksi Lain-Lain
Rp82,350,-**

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk periode yang berakhir di 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp82,350,- dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

**Transaksi Antar
Entitas
Rp13,661,066,750,-**

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk periode yang berakhir di 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 13,661,066,750,- dan Rp 23,263,948,704,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	13.696.631.691
Diterima dari Entitas Lain	(35.564.941)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	13.661.066.750

*Diterima dari Entitas Lain (DDEL)
(Rp 35.564.941)
Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
Rp 13.661.066.750,-*

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga periode 30 Juni Tahun 2024, DDEL sebesar (Rp35.564.941,-) sedangkan DKEL sebesar Rp 13.661.066.750,-.

*Transfer Masuk
Rp 0,-
Transfer Keluar
Rp0,-*

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada periode hingga periode 30 Juni 2024, Transfer Masuk sebesar Rp 5.220.000,- dan Transfer Keluar sebesar Rp0,-.

*PHL & PPHL
Rp0,-*

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan Semester I TA 2024 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan Semester I TA 2024 adalah Rp0.

*Ekuitas Akhir
Rp 49,961,355,619,-*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Pangkalan Pengawasan SDKP Tual untuk Semester I Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp49.961.355.619 dan Rp54.152.735.120.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SEBELUM TANGGAL NERACA

- ⇒ Pada tanggal 30 Juni 2024 Pangkalan PSDKP Tual Melakukan Jurnal Balik Utang Kepada Pihak Ketiga terkait Pembayaran Uang Makan PNS selama 8 hari kerja terhitung 18 s/d 29 Desember 2023 Untuk 57 Pegawai sesuai SPM Nomor 00004T/440853/2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Nomor SP2D 240841302000011 tanggal 15 Januari 2024 senilai Rp14.532.000,-
- ⇒ Pada tanggal 30 Juni 2024 Pangkalan PSDKP Tual Melakukan Jurnal Balik Utang Kepada Pihak Ketiga terkait Pembayaran Uang Makan PPPK selama 8 hari kerja terhitung 18 s/d 29 Desember 2023 Untuk 3 Pegawai sesuai SPM Nomor 00003T/440853/2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Nomor SP2D 240841302000012 tanggal 15 Januari 2024 senilai Rp888.000,-
- ⇒ Pada tanggal 30 Juni 2024 Pangkalan PSDKP Tual Melakukan Jurnal Balik Utang Kepada Pihak Ketiga terkait Beban Langganan Telepon/Internet Bulan Desember 2023 yang masih harus di bayarkan pada Bulan Januari 2024 senilai Rp7.138.567,- dengan rincian sebagai berikut;
 - ✚ Tagihan Internet Kantor Pangkalan PSDKP Tual bulan Desember 2023 sebesar Rp2,700,750,-
 - ✚ Tagihan Internet Kantor Satwas SDKP Merauke bulan Desember 2023 sebesar Rp336,467,-
 - ✚ Tagihan Internet Kantor Satwas SDKP Sorong bulan Desember 2023 sebesar Rp496,950,-
 - ✚ Tagihan Internet Kantor Satwas SDKP Maluku Tenggara Barat bulan Desember 2023 sebesar Rp1,032,300,-
 - ✚ Tagihan Internet Kantor Satwas SDKP Kaimana bulan Desember 2023 sebesar Rp821,400,-
 - ✚ Tagihan Internet Kantor Wilker PSDKP Dobo bulan Desember 2023 sebesar Rp429,850,-
 - ✚ Tagihan Internet Kantor Wilker PSDKP Raja Ampat bulan Desember 2023 sebesar Rp657,400,-
 - ✚ Tagihan Internet Kantor Wilker PSDKP Fakfak bulan Desember 2023 sebesar Rp663,450,-
- ⇒ Pada tanggal 30 Juni 2024 Pangkalan PSDKP Tual Melakukan Jurnal Balik Utang Kepada Pihak Ketiga terkait Beban Langganan Listrik Bulan Desember 2023 yang masih harus di bayarkan pada Bulan Januari 2024 senilai Rp34.139.615,- dengan rincian sebagai berikut;
 - ✚ Tagihan listrik utama Pangkalan PSDKP Tual Desember 2023 sebesar Rp20.824.144,-

- ✚ Tagihan listrik darat Pangkalan PSDKP Tual Desember 2023 sebesar Rp10.003.236,-
 - ✚ Tagihan listrik kantor Satwas SDKP Merauke Desember 2023 sebesar Rp834.172,-
 - ✚ Tagihan listrik kantor Satwas SDKP Sorong Desember 2023 sebesar Rp1.939.890,-
 - ✚ Tagihan listrik kantor Wilker PSDKP Dobo Desember 2023 sebesar Rp 538.173,-
- ⇒ Pada tanggal 30 Juni 2024 Pangkalan PSDKP Tual Melakukan Jurnal Balik Utang Kepada Pihak Ketiga terkait Beban Langganan Air Bulan Desember 2023 yang masih harus di bayarkan pada Bulan Januari 2024 senilai Rp680.285,- dengan rincian sebagai berikut;
- ✚ Tagihan Air kantor Satwas SDKP Sorong bulan Desember 2023 sebesar Rp492.785,-
 - ✚ Tagihan Air kantor Satwas SDKP Maluku Tenggara Barat bulan Desember 2023 sebesar Rp130.500,-
 - ✚ Tagihan Air kantor Wilker SDKP Dobo bulan Desember 2023 sebesar Rp57.000,-
- ⇒ Pada tanggal 30 Juni 2024 terdapat sisa bahan bakar minyak (BBM) berjenis Dexlite pada Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Tual sebanyak **13,380 Liter** dengan nilai **Rp312,102,094,-**. Berikut rincian penjelasan nya:
- ✚ Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu Macan 06 memiliki sisa BBM jenis Dexlite sebanyak **1,427 liter** dengan nilai **Rp33,059,309,-**
 - ✚ Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu 14 memiliki sisa BBM jenis Dexlite sebanyak **11,953 liter** dengan nilai **Rp279,042,785,-**
- ⇒ Rincian Aset tetap lainnya sampai dengan berakhirnya Semester I TA 2024 masih tidak ada perubahan yaitu senilai Rp142.680.000,- yang merupakan Aset Tetap Dalam Renovasi berupa **Pekerjaan Pengurukan Tanah** kantor Wilker PSDKP Raja Ampat yang hak kepemilikan tanahnya masih di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
- ⇒ Terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin atas Risalah Lelang nomor 118/17.02/2024-01 tanggal 22 April 2024 berupa 1 (satu) unit Speedboat Merk/Type Napoleon 44 dengan panjang 12 m dan Tahun Perolehan 2015 memiliki harga lelang senilai **Rp4.977.952,00** (empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang dibuktikan dengan nomor NTB **141564505596** dan nomor NTPN **3F79461QV3RSCOHR**.
- ⇒ Terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin atas Risalah Lelang nomor 100/17.03/2024-01 tanggal 13 Mei 2024 berupa 1 (satu) unit Speedboat Merk/Type Napoleon 43 dengan panjang 12 m dan Tahun Perolehan 2015 memiliki harga lelang senilai

Rp10.185.952,00 (sepuluh juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang dibuktikan dengan nomor NTB **373230913170** dan nomor NTPN **78E9C1JNFV2KAMAF**.

- ⇒ Terdapat Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah senilai **Rp3,931,037** dengan rincian:
1. Pos Pengawasan SDKP Sorong senilai Rp1.608.750
 2. Pembuatan Repairlist docking Kapal Pengawas senilai Rp1.516.882
 3. Pengadaan Drone, GPS, Kamera dan Water Quality Meter senilai Rp805.405
- ⇒ Terdapat Pagu Anggaran Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual yang merupakan **Program Prioritas Nasional (PN)** diantaranya:
1. QDD.001 Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
 2. QHD.001 Operasi Kapal Pengawas
 3. QHD.003 Operasi Speedboat Pengawas
 4. RBQ.001 Prasarana Pengawasan SDKP
 5. RCG.001 Armada Pengawasan SDKP yang dirawat
 6. QIC.001 Unit Usaha Sektor Kelautan
 7. QIC.002 Unit Usaha Perikanan yang diawasi kegiatan penangkapan ikan
 8. QIC.004 Unit Usaha Sektor Perikanan yang diawasi kepatuhan

Adanya refocusing anggaran pada Pangkalan Pengawasan SDKP Tual pada revisi DIPA ke 14 tanggal 23 Desember 2022 menambah *tagging* PC PN pada alokasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Tual. Adapun alokasi anggaran yang mendapat *tagging Prioritas Nasional (PN)* setelah refocusing per periode 31 Desember 2023 rinciannya sebagai berikut:

NO	KODE OUTPUT/Sub Out	URAIAN OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI BELANJA (RP)	% SERAPAN
1	2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	15.280.519.000	15.279.167.267	99,99
2	2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup	11.685.970.000	11.685.955.266	100,00
3	2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	428.279.000	428.218.796	99,99
4	2353.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	428.595.000	428.504.548	99,98
TOTAL			27.823.363.000	27.821.845.877	99,99

Realisasi anggaran PN Pangkalan Pengawasan SDKP Tual Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.821.645.877,- dari total alokasi anggaran Rp27.823.363.000,-.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1) Rekening Pemerintah dan NPWP Satuan Kerja.

Berdasarkan surat persetujuan kembali atas pembukaan rekening milik Pangkalan Pengawasan SDKP Tual dari KPPN Tual Nomor S-4/WPB.32/KP.03/2021 Tanggal 05 Januari 2021 bahwa pada dasarnya menyetujui pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Mandiri Cabang Tual dengan Nomor rekening **186-00-0202100-0** a.n **BPG 084 PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL**. NPWP Pangkalan Pengawasan SDKP Tual **00.172.735.3-941.000** a.n Pangkalan Pengawasan SDKP Tual.

2) Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Anggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.82/MEN/KU.611/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Perubahan Ketsatu Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (terlampir) dengan rincian sebagai berikut:

EKSISTING	
<i>Kuasa Pengguna Anggaran</i>	<i>Sigit Bintoro, S.Pi</i>
	19721022 199803 1 004

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.001/KPA-LAN.6/KU.611/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual (terlampir) dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Pejabat Pembuat Komitmen	Yopi Yuspilan, S.Pi
Pejabat Pembuat Komitmen	Zulfikar Afandy, S.Pi, M.Si
Pejabat PSPM	Zulfikar Anshari Rumahekey, S.Pi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.002/KPA-LAN.6/KU.611/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual (terlampir) dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Bendahara Pengeluaran	Junawilman Rahakbauw, A.Md,

3) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Revisi.

DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual (440853) Nomor: SP DIPA-032.05.2.440853/2023 Tanggal 23 November 2023, kode *Digital Stamp (DS)* : 2981-0100-6709-1267 dengan Nilai Pagu Anggaran **Rp70.706.563.000,-** (Tujuh Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu *Rupiah*).

Sampai dengan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan periode TA 2024 tanggal 30 Juni 2024 ini, Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual (440853) telah melakukan revisi DIPA sebanyak 5 (lima) kali dengan keterangan sebagai berikut:

- **Revisi DIPA ke 01** hanya Revisi Blokir AA sebesar Rp. 949.524.000 dan Buka Blokir Perangkat Pengolah Data sebesar Rp. 150.000.000
- **Revisi DIPA ke 02** hanya Revisi Halaman III DIPA meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024.
- **Revisi DIPA ke 03** hanya Revisi Halaman III DIPA yang meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024.
- **Revisi DIPA ke 04** hanya Buka anggaran yang diblokir sebesar total Rp. 82.250.000 yang di revisi ke anggaran Listrik Darat oleh karena adanya peningkatan biaya Listrik Darat dikarenakan potensi pada Tahun 2024 banyak Kapal Pengawas Perikanan yang melakukan Pengawasan di Zona 3 (WPP 718) dan bersandar di Dermaga Pangkalan PSDKP Tual dan Pengurangan Volume Output Dikarenakan terjadi kesalahan pada sistem SAKTI pada saat penginputan sehingga mengakibatkan Volume Output pada 2355.CAN (Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan 2355.EBB (Layanan Sarana dan Prasarana Internal) terinput otomatis mengikuti Volume Output TA.2023 dimana yang seharusnya 2355.CAN hanya 6 Unit menjadi 12 Unit dan 2355. EBB yang seharusnya 5 Unit menjadi 6 Unit.
- **Revisi DIPA ke 05** hanya Revisi Halaman III DIPA yang meliputi Perubahan Rencana Penarikan Dana pada satker Pangkalan Pengawasan SDKP Tual serta untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2024.

4) Penetapan Status BMN.

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna TA 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	17.914.787.000	-
2	Peralatan dan Mesin	81.239.556.273	-
3	Gedung dan Bangunan	18.037.392.769	98.019.350
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	24.674.199.706	-
5	Aset Tetap Lainnya (henti guna)	34.725.000	-
6	Aset Tak Berwujud	-	-
TOTAL		139.002.944.633	2.380.351.465

- Dari total Gedung dan bangunan Rp18.037.392.769,- senilai Rp17.939.373.419,- aset sudah dilakukan penetapan status penggunaan PSP dan senilai Rp98.019.350,- belum dilakukan pengajuan karena merupakan aset yang diperoleh pada Tahun Anggaran 2023.

5) Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Terdapat hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Belanja Pegawai Tugas Belajar di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP, UPT Pangkalan PSDKP Tual terhitung mulai tahun 2022 s/d tahun 2023 yaitu senilai **Rp16,470,000,-** sesuai Surat Tugas Anggota IV BPK RI Nomor: 01/ST/VI/01/2024 tanggal 9 Januari 2024. Berikut akan dijelaskan secara detail berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 Rekapitulasi berdasarkan Satker

No	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)				Jumlah
	Tunjangan Jabatan Fungsional 2022	Tunjangan Jabatan Umum 2022	Tunjangan Jabatan Fungsional 2023	Tunjangan Jabatan Umum 2023	
1	3.240.000	3.330.000	3.240.000	6.660.000	16.470.000
Jumlah	3.240.000	3.330.000	3.240.000	6.660.000	16.470.000

Tabel 5.2 Rekapitulasi berdasarkan Pegawai

No	Nilai Kelebihan Pembayaran (Rp)					Jumlah
	Nama NIP	Tunjangan Jabatan Fungsional 2022	Tunjangan Jabatan Umum 2022	Tunjangan Jabatan Fungsional 2023	Tunjangan Jabatan Umum 2023	
1	Seto Nugroho, S.Pi 198412212008011004	3.240.000	1.110.000	-	2.590.000	7.680.000
2	Felix Paduli, A.Md 197910112006041004	-	2.220.000	-	1.850.000	4.070.000
3	Riyan Maulana, S.Pi 199204242015031001	-	-	1.620.000	1.110.000	3.470.000
4	Hadi Purwanto, S.Pi 199204242015031001	-	-	1.620.000	1.110.000	3.470.000
Jumlah						16.470.000

- Menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK RI atas Belanja Pegawai Tugas Belajar pada tabel tersebut diatas, maka:
 1. Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode Billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 2. Kepada Para Pegawai tersebut diatas diwajibkan untuk melakukan pembayaran;
 3. Bendahara Penerimaan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (Simponi);
- Adapun Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Pegawai Tugas Belajar tersebut diatas adalah sebagai berikut:
 1. Seto Nugroho, S.Pi
 - a. NTPN: **C91D51JNFV2CSRV7** senilai Rp3,240,000 atas pengembalian tunjangan jabatan fungsional tahun 2022.
 - b. NTPN: **3F51E7QLUP33NS9O** senilai Rp1,110,000 atas pengembalian tunjangan jabatan umum tahun 2022.
 - c. NTPN: **F60DD48VVEPI3T0Q** senilai Rp2,590,000 atas pengembalian tunjangan jabatan umum tahun 2023.
 2. Felix Paduli, A.Md
 - a. NTPN: **E13752G4VPKPA0NC** senilai Rp2,220,000 atas pengembalian tunjangan jabatan umum tahun 2022.
 - b. NTPN: **4B91861QV3UAU017** senilai Rp1,850,000 atas pengembalian tunjangan jabatan umum tahun 2023.

3. Riyan Maulana, S.Pi
 - a. NTPN: **8AAEF6U8EUGNB4S8** senilai Rp1,620,000 atas pengembalian tunjangan jabatan fungsional tahun 2023.
 - b. NTPN: **330A57QLUP33Q1R7** senilai Rp1,110,000 atas pengembalian tunjangan jabatan umum tahun 2023.
4. Hadi Purwanto, S.Pi
 - a. NTPN: **5CAE32G4VPKPC39K** senilai Rp1,620,000 atas pengembalian tunjangan jabatan fungsional tahun 2023.
 - b. NTPN: **B50BF55DF9BUJ2S3** senilai Rp1,110,000 atas pengembalian tunjangan jabatan umum tahun 2023.